

**KELEMBAGAAN KELOMPOK TANI HUTAN KEMASYARAKATAN DI  
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BATUTEGI**

(Skripsi)

Oleh

**WILLIAM PANGESTU**

**1514151086**



**FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

## **ABSTRAK**

### **KELEMBAGAAN KELOMPOK TANI HUTAN KEMASYARAKATAN DI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BATUTEGI**

**Oleh**

**WILLIAM PANGESTU**

Kelembagaan adalah aturan main yang berlaku dalam masyarakat yang disepakati oleh anggota sebagai sesuatu yang harus diikuti dan dipatuhi dengan tujuan terciptanya keteraturan dan kepastian interaksi diantara sesama anggota masyarakat. Kelembagaan memberikan pengaruh tingkat kepatuhan anggota dalam menjalankan aturan. Kelembagaan juga diharapkan mampu memberi solusi bagi petani dalam pengelolaan lahan Hutan Kemasyarakatan (HKm). Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi sejarah terbentuknya Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Mahardika dan Sinar Harapan dan menganalisis, mengukur tingkat ketercapaian tujuan kelembagaan Gapoktan Mahardika dan Sinar Harapan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batutegi Provinsi Lampung. Pengambilan data dilakukan pada bulan Juli 2019 dan Maret 2021 dengan menggunakan daftar pertanyaan dan wawancara mendalam (*in depth interview*) pada beberapa informan kunci sebanyak 15 responden dari kedua Gapoktan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian anggota Mahardika merupakan penduduk pendatang sedangkan anggota Sinar Harapan merupakan penduduk asli yang telah menetap dan menanam kopi sejak tahun 1980. Lahan HKm di Gapoktan Mahardika dikelola dengan mengkombinasikan tanaman kopi dengan pohon pelindung serta tanaman lainnya sedangkan di Gapoktan

Sinar Harapan cenderung monokultur kopi. Kelembagaan pada Gapoktan Mahardika dan Sinar Harapan mempunyai beberapa kesamaan, misalnya pada pola perekrutan anggota dan frekuensi pertemuan kelompok. Namun terdapat perbedaan pada cara pengambilan keputusan dimana pada Gapoktan Mahardika dilakukan oleh ketua KTH dan ketua Gapoktan sedangkan pada Gapoktan Sinar Harapan dilakukan secara musyawarah dengan semua pengurus dan anggota.

Kata kunci: aspek kultural, aspek struktural, kapasitas kelembagaan, keanggotaan, kepemimpinan.

## **ABSTRACT**

### **INSTITUTIONAL FARMER GROUPS IN FOREST COMMUNITY PROGRAM A FOREST MANAGEMENT UNIT BATUTEGI**

**By**

**WILLIAM PANGESTU**

Institutions are the rules of the game that apply in community that are agreed upon by members as something that must be followed and obeyed with the aim of creating regularity and certainty of interaction among fellow community members. Institutions affect the level of compliance of members in carrying out the rules. Institutions are also expected to be able to provide solutions for farmers in land management in community forest programe (HKm). The purpose of this study to identify the history of the formation Mahardika and Sinar Harapan farmers Group Association and analyze, measure the level of achievement of the institutional goals of Mahardika and Sinar Harapan in the Batutegi protection Forest Management Unit, Lampung Province. Data collection was carried out in July 2019 and March 2021 using questions and in-depth interviews with several key informants. The results showed that some of Mahardika's members were local immigrants while Sinar Harapan's members were indigenous people who had settled and planted coffee since 1980. The Hkm land in Mahardika is managed by combining coffee plants with shade trees and other plants, while in Sinar Harapan it tends to be monoculture of coffee. The institutions of Mahardika and Sinar Harapan have several similarities, for example in

the pattern of member recruitment and the frequency of group meetings. However, there are differences in the way decisions are made where Mahardika is carried out by the lead of farmer group and Gapoktan while Sinar Harapan is carried out in deliberation with all group administrators and members.

**Keywords:** cultural aspects, institutional capacity, leadership, membership, structural aspects.

**KELEMBAGAAN KELOMPOK TANI HUTAN KEMASYARAKATAN DI  
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BATUTEGI**

**(Skripsi)**

Oleh

**William Pangestu**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
SARJANA KEHUTANAN**

**Pada**

**Jurusan Kehutanan  
Fakultas Pertanian Universitas Lampung**



**FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

Judul Skripsi

**KELEMBAGAAN KELOMPOK TANI HUTAN  
KEMASYARAKATAN DI KESATUAN  
PENGELOLAAN HUTAN BATUTEGI**

Nama Mahasiswa

**William Pangestu**

Nomor Pokok Mahasiswa

**1514151086**

Jurusan/Program Studi

**Kehutanan**

Fakultas

**Pertanian**

**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing



**Rommy Qurniati, S.P., M.Si.**  
NIP 197609122002122001



**Hari Kaskoyo, Ph.D., S.Hut., M.P.**  
NIP 196906011998021002

2. Ketua Jurusan Kehutanan



**Dr. Indra Gumay Febryano, S.Hut., M.Si.**  
NIP 197402222003121001

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Rommy Qurniati, S.P., M.Si.**

**Sekretaris : Hari Kaskoyo, Ph.D., S.Hut., M.P.**

**Penguji  
Bukan Pembimbing : Dr. Ir. Slamet Budi Yuwono, M.S.**

**2. Dekan Fakultas Pertanian**



**Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.Si.**  
NIP. 196110201986031002

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 01 Juli 2022**

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, 26 Maret 1997. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Wahyudi Widodo dan Ibu Masdiana.

Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung tahun 2003-2009, Sekolah Menengah Pertama di SMP N 14 Bandar Lampung tahun 2009-2012, dan Sekolah Menengah Atas di SMA N 16 Bandar Lampung tahun 2012-2015, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi internal Himpunan Mahasiswa Kehutanan (HIMASYLVA) sebagai pengurus Bidang 1 Rumah Tangga periode 2016-2019 dan organisasi eksternal di Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Penulis juga pernah mengikuti Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (KMI) di Politeknik Negeri Pontianak pada tahun 2017 dan Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (KMI) di Institut Pertanian Bogor pada tahun 2018.

Penulis melaksanakan kegiatan Praktik Umum (PU) di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pekalongan Barat Jawa Tengah pada bulan Juli hingga Agustus 2018 selama 40 hari. Penulis juga melaksanakan Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Way Limau Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan pada bulan Januari hingga Februari 2019 selama 40 hari.

## SANWACANA

Puji syukur akan selalu terucap kehadirat Allah SWT, atas izinnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “ Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Batutegei”. Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan (S.Hut) di Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Tidak lupa shalawat beserta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya hingga akhir zaman Aamiin.

Penulis menyadari, bahwa penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan kemurahan hati dari berbagai pihak, oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.Si. selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Indra Gumay F, S.Hut., M.Si. selaku Ketua Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung atas bimbingan, waktu, materi dan juga motivasi kepada penulis selama berada di Jurusan Kehutanan.
3. Ibu Rommy Qurniati, S.P., M.Si. selaku pembimbing utama sekaligus Pembimbing Akademik (PA) yang telah banyak memberikan motivasi,

arahan, kritik dan saran selama penulis menjadi mahasiswa hingga melakukan penelitian dan terselesaikannya skripsi ini.

4. Bapak Hari Kaskoyo, Ph.D., S.Hut., M.P. selaku pembimbing kedua saya yang telah memberikan bimbingan dan masukan selama penulis melakukan penelitian hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak Dr. Ir. Slamet Budi Yuwono, M.S. selaku pembahas dan penguji utama atas kritik dan saran yang membangun dalam penyelesaian skripsi.
6. Seluruh dosen Jurusan Kehutanan dan Staf atas ilmu, pengalaman, bantuan materi maupun motivasi kepada penulis selama berada di Jurusan Kehutanan.
7. Kedua Orang Tua Ayah yaitu Wahyudi Widodo dan Ibu Masdiana yang selalu memberikan motivasi dan doa untuk kelancaran penulis dalam menggapai cita-cita.
8. Sahabat penulis yang tergabung dalam komunitas Pita Hijau yaitu Abdul Rouf Amarullah Khalil, Aldy Mega saputra, Beny Kurniawan, Duta Aditya Perdana Putra, Miftahudin, Muhammad Sarpin Pratama, Rizki Parliansyah Rendy Cahyo Hendratmoko dan Tri Yulianto.
9. Teman seperjuangan Kehutanan 2015 atas dukungan yang diberikan dari penulis melaksanakan penelitian hingga kepenulisan skripsi ini.
10. Seluruh anggota skuad konservasi dan TWISTER 2015.  
Semua pihak yang telah membantu penulis dan terlibat dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas setiap amal kebaikan kalian. Penulis menyadari, bahwa penulisan skripsi ini masih belum sempurna dan berharap skripsi ini dapat bermanfaat untuk pembacanya.

Bandar Lampung, September 2022

**William Pangestu**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	ix
<b>SANWACANA</b> .....	x
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	2
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Kerangka Pemikiran .....	3
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	5
2.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	5
2.2 Kesatuan Pengelolaan Hutan .....	6
2.3 Hutan Kemasyarakatan (HKm).....	8
2.4 Kelembagaan.....	9
<b>III. METODE PENELITIAN</b> .....	12
3.1 Lokasi dan Waktu .....	12
3.2 Alat dan Objek Penelitian .....	13
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	13
3.4 Analisis Data.....	15
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	16
4.1 Sejarah Lahirnya Kelembagaan .....	16
4.2 Aktivitas Pengelolaan Lahan .....	18
4.3 Aspek Struktural .....	20
4.4 Tujuan Kelembagaan .....	21
4.5 Keanggotaan .....	22
4.6 Kepemimpinan.....	24
4.7 Aspek Kultural .....	26
4.8 Kapasitas Kelembagaan .....	28

<b>V. SIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1 Simpulan .....	30
2.2 Saran .....	30
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>32</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>35</b>
<b>DAFTAR PERTANYAAN .....</b>	<b>36</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>40</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Variabel, Sumber dan Teknik Pengambilan Data .....	14
2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pengelolaan Lahan di Gapoktan Mahardika dan Sinar Harapan.....	19
3. Keberhasilan dan Kepuasan Terhadap Program Kelembagaan .....	21
4. Keanggotaan Gapoktan Mahardika dan Sinar Harapan .....	23
5. Landasan Kepemimpinan.....	25
6. Aspek Kultural .....	26

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1 Kerangka Pemikiran Penelitian .....	4
3 Peta Lokasi KPHL Batutegi .....	12
3 Wawancara dengan ketua Gapoktan Sinar Harapan .....	40
4 Wawancara dengan petani Gapoktan Sinar Harapan .....	40
5 Wawancara dengan petani Gapoktan Mahardika.....	41
6 Wawancara dengan ketua Gapoktan Mahardika.....	41
7 Wawancara dengan pengurus Gapoktan Mahardika.....	42
8 Foto bersama dengan anggota Gapoktan Sinar Harapan .....	42

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Hutan Kemasyarakatan (HKm) merupakan kegiatan pengendalian dan pengelolaan sumberdaya hutan oleh masyarakat lokal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan sebagai bagian terpadu dari sistem pertanian setempat (Soemarwoto, 2000). Izin HKm diberikan oleh pemerintah kepada kelompok tani (Emmanuel, 2014).

Masyarakat desa yang tinggal dekat dengan kawasan hutan Batutege memiliki kondisi ekonomi dan sosial yang masih tertinggal. Agar kondisi ekonomi tersebut meningkat, perlu diberikan hak pengelolaan hutan melalui program HKm agar ekonomi masyarakat meningkat menjadi lebih baik tanpa mengabaikan kelestarian hutan (Ofuoku and Chukwuji, 2012).

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Batutege dengan luas  $\pm 58.174$  Ha memiliki 28 Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) dan 10 diantaranya telah mendapatkan izin pengelolaan serta sisanya sedang dalam fasilitasi pengajuan permohonan izin pengelolaan maupun dalam tahap verifikasi oleh Kementerian Kehutanan (RPHJP KPHL Batutege, 2014). Pelaksanaan pengelolaan lahan HKm yang dilakukan kelompok tani bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomi dan sosial, tetapi harus melindungi dan menjaga areal kawasan terutama dari kegiatan ilegal yang dapat merugikan negara, terutama para petani yang kehidupan sehari - harinya masih bergantung pada kawasan hutan dan sebagian kecil lainnya bekerja sebagai pegawai negeri dan sektor jasa (Raya, 2014).

Gapoktan yang telah mendapatkan izin pengelolaan antara lain adalah Gapoktan Mahardika dan Sinar Harapan. Gapoktan Mahardika berada di Resort Batulima, Pekon Sidomulyo, Kecamatan Air Nanningan, Kabupaten Tanggamus berada di Register 32 Bukit Rinding dengan luas 2.340 Ha. Gapoktan Sinar Harapan berada di Resort Datar Setuju, Pekon Datar Lebuay, Kecamatan Air Nanningan, Kabupaten Tanggamus berada di Register 32 Bukit Rinding dengan luas 4.834 Ha.

Anggota Gapoktan Mahardika dan Sinar Harapan bermata pencaharian sebagai petani, hal ini menarik diteliti karena berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Qurniati *et al* (2017) kedua GAPOKTAN tersebut memiliki pendapatan dari hasil Hkm yang sangat berbeda. Aminah (2018) menjelaskan bahwa kelembagaan yang aktif akan cenderung memberikan dampak positif terhadap kedinamisan kelompok. Penguatan kelembagaan dalam Gapoktan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial dan berpengaruh pada kelestarian sumber daya alam, yang salah satunya adalah hutan. Perbedaan pendapatan pun menarik diteliti karena Gapoktan Mahardika memiliki pendapatan yang lebih kecil jika dibandingkan dengan Gapoktan Sinar Harapan, Perbedaan yang signifikan tersebut maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan kelembagaan dalam pengelolaan HKM di Gapoktan Mahardika dan Gapoktan Sinar Harapan yang terletak dibawah naungan Kesatuan Pengelolaan Hutan Batutegi Kabupaten Tanggamus.

Berdasarkan kondisi tersebut, penulis akan melakukan penelitian terhadap kelembagaan kelompok tani hutan kemasyarakatan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Batutegi. Data kelembagaan terkait kelembagaan di Gapoktan Mahardika dan Sinar Harapan perlu diketahui kondisi yang akan berdampak pada ketercapaian program.

## **1.2 Rumusan Permasalahan**

1. Bagaimana sejarah terbentuknya Gapoktan Mahardika dan Sinar Harapan?
2. Bagaimana mengukur tingkat ketercapaian kelembagaan kedua Gapoktan?

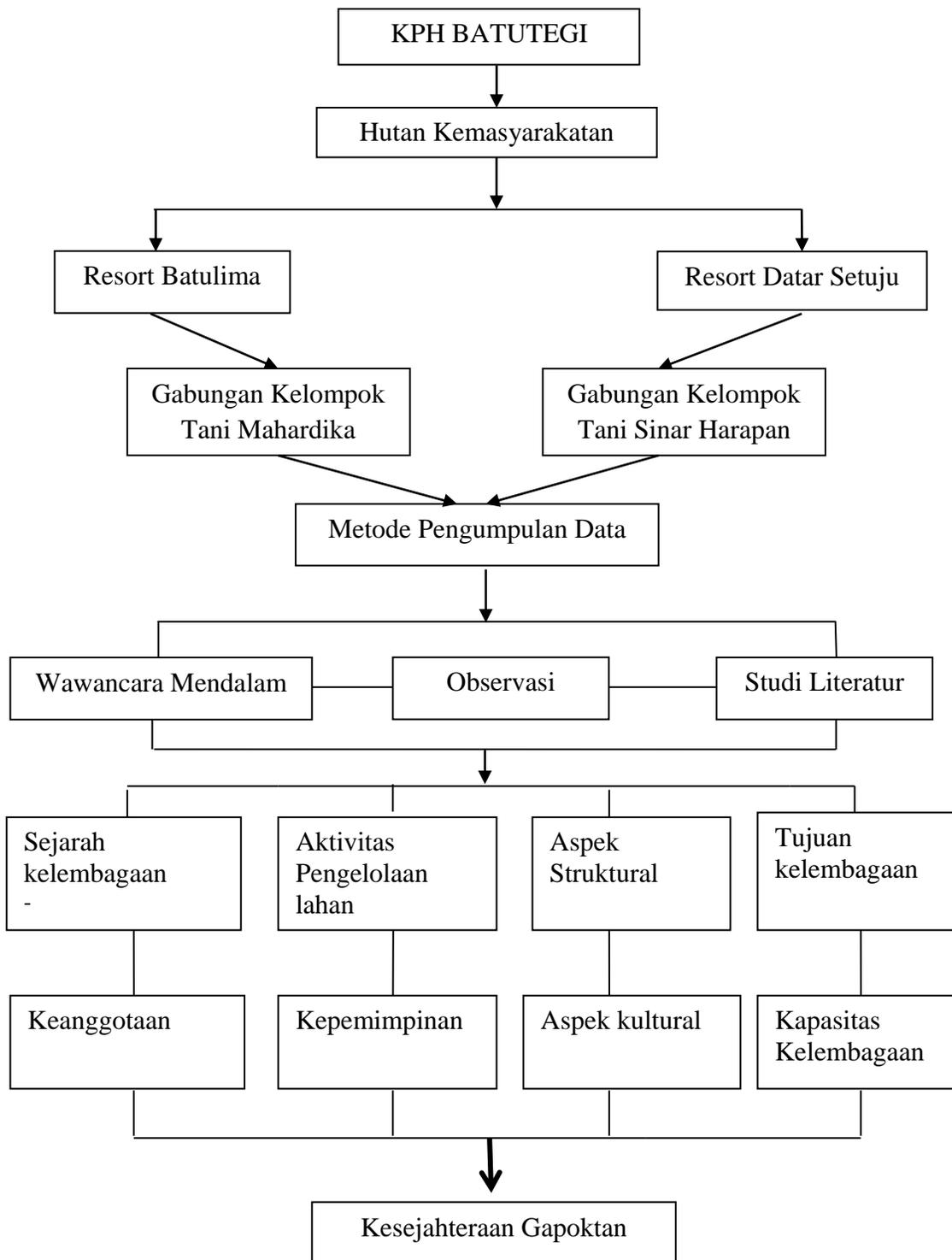
### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Mengidentifikasi sejarah terbentuknya Gapoktan Mahardika dan Sinar Harapan
2. Menganalisis dan mengukur tingkat ketercapaian tujuan kelembagaan Gapoktan Mahardika dan Sinar Harapan

### **1.4 Kerangka Pemikiran**

KPH Batutege menerapkan skema perhutanan sosial yang fokus untuk dikelola oleh masyarakat yang terletak di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Resort Batulima dan Resort Datar Setuju merupakan wilayah KPH Batutege yang telah mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) izin tadi diberikan kepada Gapoktan Mahardika dan Gapoktan Sinar Harapan.

Pencapaian tujuan HKm sangat dipengaruhi oleh kegiatan Gapoktan sebagai pemegang IUPHKm dan kelembagaan Gapoktan dalam menjamin keberlangsungan dan keberlanjutan pengelolaan HKm. Analisis terhadap sistem kelembagaan di Gapoktan Mahardika dan Sinar Harapan di KPH Batutege terdiri dari analisis sejarah terbentuknya kelembagaan, analisis efektivitas kelembagaan tersebut dalam mencapai semua tujuan yang dibuat serta analisis faktor pendukung dan penghambat peningkatan peran kelembagaan pada kedua Gapoktan tersebut. Bagan kerangka pemikiran dapat dilihat pada (Gambar 1).



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

KPH Batutegi terletak pada 104°27'-104°54' BT dan 5°5'-5°22' LS dengan batas utara Kabupaten Lampung Barat, sebelah selatan Kabupaten Tanggamus, sebelah barat Kabupaten Lampung Barat dan sebelah timur Kabupaten Lampung Tengah. KPH Batutegi meliputi kawasan Hutan Lindung Register 39 Kota Agung Utara, sebagian kawasan hutan Register 22 Way Waya dan sebagian kawasan hutan lindung Register 32 Bukit Rinding. 82,28% KPH Batutegi terdiri dari kawasan hutan dengan luasan 35.711 ha dan 17,72% untuk penggunaan lain yang memiliki luasan 7.693 ha (KPH Batutegi, 2012). Batas – batas KPH Batutegi adalah sebagai berikut :

1. Sebelah utara : Non Hutan (APL) dan KPHL Unit VII
2. Sebelah selatan : Non Hutan (APL)
3. Sebelah barat : Non Hutan (APL) dan KPHL Kota Agung Utara
4. Sebelah timur : Non Hutan (APL) dan KPHL Unit VII

Survey khusus tentang potensi hasil hutan bukan kayu dalam wilayah kelola KPHL Batutegi belum dilakukan. Data potensi hasil hutan bukan kayu pada dua gabungan kelompok tani (gapoktan) yang sedang menyusun proposal pengajuan IUPHKm dengan luas areal yang diusulkan yaitu sebesar  $\pm 2.877$  ha. Jenis tanaman yang ditanami oleh gapoktan meliputi tanaman penghasil buah (kakau, kopi, alpukat, kemiri, petai, jengkol, cengkeh, lada, nangka dan durian), tanaman penghasil kayu (mahoni, cempaka, medang, albasia dan jati), dan tanaman penghasil getah (karet).

Terdapat 2 blok yang dikelola oleh tata hutan KPH Batutegei yakni blok pemanfaatan yang difungsikan sebagai areal yang direncanakan untuk pemanfaatan terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pemanfaatan hutan pada kawasan hutan yang berfungsi sebagai hutan lindung dan blok inti yakni sebagai perlindungan tata air dan perlindungan lainnya. Lokasi penelitian berada pada blok pemanfaatan dan blok inti yang telah mendapatkan IUPHKm yakni Gapoktan Mahardika dan Gapoktan Sinar Harapan. Gapoktan Mahardika berada di Resort Batulima, Register 32 Bukit Rinding Kabupaten Tanggamus, hampir sebagian besar Resort Batulima memiliki lahan campuran, semak belukar dan hutan sekunder. Gapoktan Mahardika mempunyai lahan seluas 2.366,50 Ha. Sedangkan Gapoktan Sinar Harapan berada di Resort Datar Setuju kawasan hutan lindung register 39 Kota Agung Utara Kabupaten Tanggamus. Gapoktan Sinar Harapan mempunyai lahan seluas 5.031,44 Ha (KPH Batutegei, 2012).

## **2.2 Kesatuan Pengelolaan Hutan**

Menurut PP No.6 Tahun 2007 Pasal 1 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) diartikan sebagai wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari serta yang tercantum dalam SK Menhut tersebut apat di Tanggamus dan merupakan *catchment* area Bendungan Batutegei.. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 230/Kpts-II/2003 tentang Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi menyebutkan pengertian KPH Produksi adalah unit pengelolaan hutan produksi terkecil yang dapat dikelola secara efisien dan lestari (Firdaus, 2012).

Unit pengelolaan hutan berdasarkan fungsinya dibagi menjadi KPH hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi (Alivya dan Suryandari, 2008). Konsep Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan satu diantara upaya mengatasi permasalahan kehutanan Indonesia yang kondisinya makin memprihatinkan, yang ditandai dengan meningkatnya laju degradasi hutan, kurang berkembangnya investasi dibidang kehutanan, rendahnya kemajuan pembangunan hutan tanaman, kurang

terkendalinya *illegal logging* dan *illegal trade*, merosotnya perekonomian masyarakat di dalam dan sekitar hutan, serta meningkatnya luas kawasan hutan yang tidak terkelola secara baik. Melalui KPH diharapkan dapat dilakukan upaya-upaya strategis dalam bentuk deregulasi dan debirokratisasi kehutanan dengan pendekatan multi-pihak (Rizal, *et al*, 2009).

Konsep KPH sebenarnya mulai diwacanakan sejak diberlakukannya UU No.5/1967 yang pada masa itu diartikan sebagai Kesatuan Pemangkuan Hutan, sebagaimana diterapkan dalam pengelolaan hutan oleh Perum Perhutani di Pulau Jawa. Menurut UU 41/1999 konsep ini kembali dimunculkan yang kemudian diikuti dengan aturan pedoman pembentukannya seperti tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan (Rizal, *et al*, 2009).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan KPH, yakni komunikasi, sumberdaya dan tingkat partisipasi stakeholder. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian implementasi kebijakan karena implementasi yang efektif terjadi jika para *stakeholder* mengetahui apa yang akan diimplementasikan. Selain dari komunikasi, sumberdaya juga memengaruhi kebijakan KPH, salah satunya yakni sumberdaya manusia. Simmons *et al* (2015), inti dari keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat adalah partisipasi masyarakat itu sendiri. (Setiawan, 2018). Minimnya sumberdaya manusia dapat menjadikan kebijakan KPH kurang efektif, KPH memerlukan partisipasi *stakeholder* termasuk masyarakat, seperti partisipasi dalam perencanaan, sosialisasi serta mendukung dan ambil bagian dalam pelaksanaan (Ruhimat, 2010)

Konsep KPH memiliki dasar hukum dengan dikeluarkannya PP 6/2007 jo PP 3/2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, dimana berdasarkan konsep tersebut kawasan hutan di Indonesia terbagi dalam KPH, yang menjadi bagian dari penguatan sistem pengurusan hutan nasional, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. (Rizal, *et al*, 2009).

Kesatuan Pengelolaan Hutan tersebut dapat berbentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) maupun Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) tergantung dari fungsi yang luasnya dominan. Fungsi yang luasnya dominan adalah apabila dalam satu wilayah KPH terdiri lebih dari satu fungsi hutan, misalnya terdiri dari hutan yang berfungsi produksi dan hutan yang berfungsi lindung, dan jika areal dari salah satu fungsi hutan, misalnya fungsi produksi, lebih luas atau mendominasi areal yang berfungsi lindung, maka KPH tersebut dinamakan KPH Produksi KPHP. Penentuan nama KPH berdasarkan fungsi yang luasnya dominan adalah untuk efektifitas dan efisiensi pengelolaannya (Rizal *et al.*, 2002)

### **2.3 Hutan Kemasyarakatan**

Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah hutan negara dengan sistem pengelolaan Hutan yang bertujuan memberdayakan masyarakat (meningkatkan nilai ekonomi, nilai budaya, memberikan manfaat/*benefit* kepada masyarakat pengelola, dan masyarakat setempat), tanpa mengganggu fungsi pokoknya (meningkatkan fungsi hutan dan fungsi kawasan, pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dengan tetap menjaga fungsi kawasan hutan (Cahyaningsih *et al.*, 2006).

Kebijakan *community based forest management* menjadi bagian beragam dari koreksi terhadap pengelolaan hutan yang didominasi oleh usaha skala besar dalam kebijakan pada masa lalu yang telah mengakibatkan ketimpangan akses, menimbulkan dampak kemiskinan masyarakat yang hidupnya tergantung pada hutan, dan memicu konflik antara pemegang izin/konsesi dan masyarakat setempat (Suhirman *et al.*, 2012). Adanya kelembagaan dapat menjadi dasar dalam melaksanakan program HKm karena saat ini masih ditemukannya kendala dan tantangan dalam pengelolaan (Lewis & Davis, 2015; Safe'i *et al.*, 2018). Aminah (2018) menjelaskan bahwa kelembagaan yang aktif akan cenderung memberikan dampak positif terhadap kedinamisan kelompok. Permasalahan penelitian yaitu

bagaimana peran kelembagaan gapoktan dalam pengelolaan HKm. Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan peran kelembagaan gapoktan dalam mengelola HKm. Banyak pihak memandang kebijakan ini sebagai pengakuan negara terhadap pengelolaan hutan oleh rakyat yang selama ini terabaikan, namun mampu menjaga kelestarian alam dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Dengan adanya HKm diharapkan kesejahteraan masyarakat setempat dapat meningkat melalui pemanfaatan sumberdaya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup (Nandini, 2012). Provinsi Lampung sudah mengembangkan program HKm, namun dalam pelaksanaannya di tiap kabupaten atau kota berbeda-beda, ada yang sudah mengimplementasikan di lapangan, sedang menyusun proposal, maupun baru dalam tahap pencermatan (Widyastuti, 2013). Oleh karena itu proses perencanaan harus dilakukan secara cermat dengan melibatkan instansi terkait. Pedoman ini merupakan bagian dari proses penyusunan perencanaan yang harus dilaksanakan secara terkoordinasi dengan para pihak di lapangan. Pedoman ini merupakan petunjuk teknis yang bersifat arahan, sehingga cakupannya dapat dikembangkan sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah. Acuan utama adalah peraturan tentang penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan (Ritonga *et al*, 2013).

## **2.4 Kelembagaan**

Kelembagaan sebagai aturan yang berlaku dalam masyarakat (arena) yang menentukan siapa yang berhak membuat keputusan, tindakan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, aturan apa yang berlaku umum di masyarakat, prosedur apa yang harus diikuti, informasi apa yang harus atau tidak boleh disediakan dan keuntungan apa yang akan diterima seseorang sebagai hasil dari tindakan yang dilakukannya. Dalam konteks kelembagaan, yang dimaksudkan di sini adalah aturan main yang berlaku dalam masyarakat yang disepakati oleh anggota masyarakat tersebut sebagai sesuatu yang harus diikuti dan dipatuhi (memiliki kekuatan sanksi) dengan tujuan terciptanya keteraturan dan kepastian interaksi di antara

sesama anggota masyarakat, interaksi yang dimaksud terkait dengan kegiatan ekonomi politik maupun social (Ostrom, 2005). Pada dasarnya, kelembagaan dibangun untuk mencegah peluang terjadinya perilaku oportunistik, menekan perilaku *rent seeking* dan *free riding behaviour* serta meningkatkan pertukaran informasi antar pihak yang berhubungan.

Pengembangan kelembagaan kelompok tani, pengelolaan lahan, dan pengembangan kewirausahaan merupakan tiga kunci penting yang harus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak terkait perannya masing-masing agar implementasi HKm dapat berjalan sesuai dengan tujuan HKm yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian hutan. Kondisi ini sejalan dengan (Kaskoyo *et al*, 2014)

Kelembagaan pengelolaan sumberdaya hutan dapat berjalan dengan baik apabila adanya koordinasi diantara para pengelola sumberdaya hutan. Kinerja sumberdaya hutan di tingkat kelompok HKm sangat ditentukan oleh interaksi yang kompleks antara karakteristik sumberdaya manusia di dalam kelompok, tingkat penerapan teknologi pemanfaatan sumberdaya hutan dan kelembagaan kelompok yang mengatur pola hubungan antar partisipan dalam menggunakan teknologi yang tersedia untuk mengelola sumberdaya hutan. Selain itu, faktor lingkungan alam, sosial dan budaya masyarakat yang berada di sekitar kelompok HKm tersebut juga menentukan kinerja kelembagaan (Mutaqin, 2013). Perbedaan kondisi tersebut mengindikasikan bahwa untuk lebih meningkatkan efektivitas kelembagaan maka penguatan dimensi aturan main yang lemah perlu ditingkatkan.

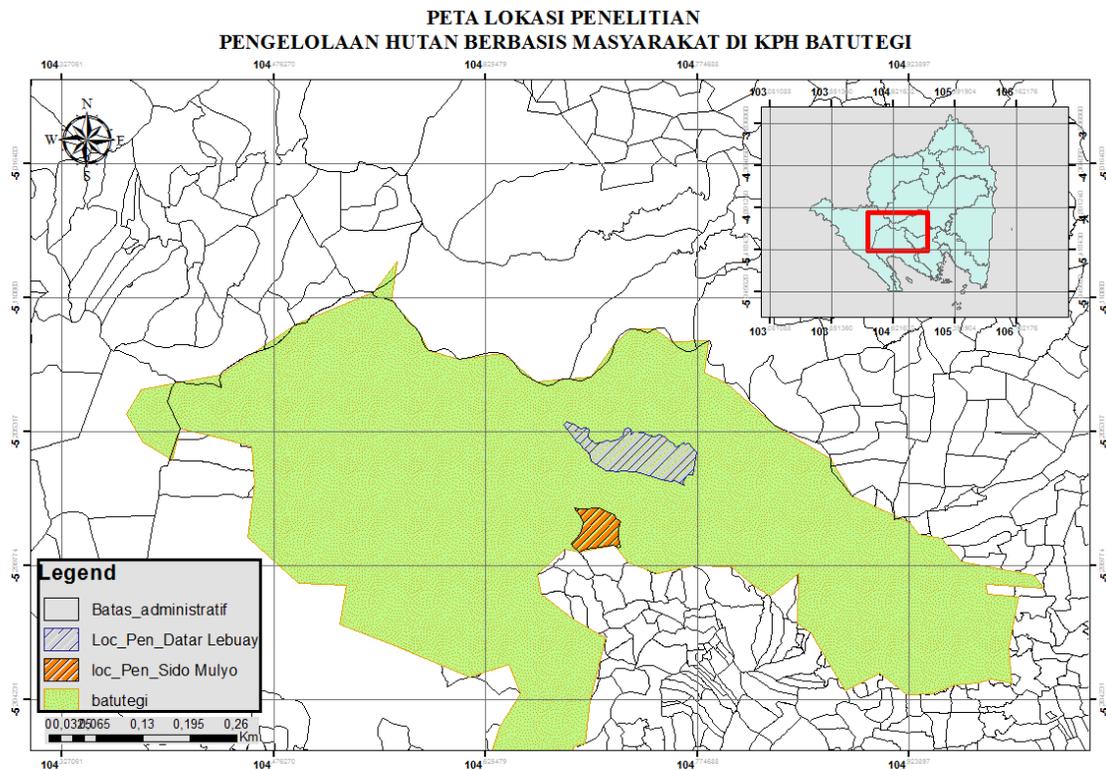
Penguatan kelembagaan dapat dilakukan melalui berbagai cara, diantaranya melalui program pemberdayaan kelompok tani. Namun demikian dalam kelembagaan kelompok tani khususnya, yang terpenting bukan hanya mapan atau tidaknya kondisi kelompok tani sebagai organisasi formal tetapi lebih pada upaya menjalankan tindakan kolektif dalam kelompok tani. (Syahyuti, 2016).

Untuk mewujudkan HKm yang bermanfaat bagi pengelolaan hutan ditentukan dari kinerja kelompok tani serta interaksi dan koordinasi dengan pihak terkait. Fungsi kelembagaan sangat mempengaruhi keberlangsungan dan keberlanjutan suatu pengelolaan yang dimulai dari perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan hingga pengawasan hutan. Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan, pada prinsipnya sebagai bentuk pengintegrasian partisipasi masyarakat ke dalam sistem pembangunan kehutanan dalam kerangka penguatan ekonomi, kelembagaan, dan sosial masyarakat (Mukhtar, 2010).

### III. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Lokasi dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan di Gabungan Kelompok Tani Mahardika dan Gabungan Kelompok Tani Sinar Harapan, Kecamatan Air Nanning, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung pada bulan Juli 2019 dan Maret 2021. Peta lokasi penelitian disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Peta Lokasi KPHL Batutegi.

### 3.2 Alat dan Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa alat bantu seperti alat perekam, kamera, dan daftar pertanyaan. Objek penelitian ini adalah masyarakat sekitar hutan yang berpotensi menjawab pertanyaan terkait penelitian. Objek tersebut juga tergabung dalam anggota Gapoktan Mahardika dan Gapoktan Sinar Harapan.

### 3.3 Metode Pengumpulan Data

Data yang diambil dalam penelitian ini terbagi atas data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan melakukan metode wawancara secara terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan dan wawancara mendalam (*in dept interview*) dengan beberapa informan kunci di Gapoktan Mahardika dan Sinar Harapan. Pemilihan informan dilakukan dengan metode *snow-ball sampling* serta wawancara dilanjutkan dengan adanya observasi atau pengamatan langsung di lapangan, berdasarkan hasil penelitian, hal ini dilakukan untuk membandingkan hasil wawancara, sehingga data yang diperoleh lebih akurat. Jumlah keseluruhan responden yang diambil sebanyak 20 orang yang terdiri dari ketua Gapoktan dan beberapa pengurus Gapoktan di kedua lokasi sehingga masing masing Gapoktan terdiri dari 10 responden. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi literatur dari jurnal dan buku yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Secara ringkas kebutuhan jenis dan sumber data didapat dari jurnal (Rubiyanto, 2011) digambarkan dalam Tabel Variabel dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1. Variabel, sumber dan teknik pengambilan data.

<b>No. Variabel</b>	<b>Data yang diambil</b>	<b>Teknik pengumpulan data</b>	<b>Sumber data</b>
1. Sejarah lahirnya Kelembagaan	Tahun terbentuk, nama awal, lokasi, pencetus	<i>in-depth interview</i>	Ketua Kelompok Tani
2. Aktivitas Pengelolaan Lahan	Jenis aktivitas, Kendala, Upaya Stakeholder yang terlibat	Daftar Pertanyaan	Anggota Kelompok Tani
3. Aspek Struktural	Luas cakupan Wilayah, Struktur Organisasi, Pengambilan Keputusan dominan, Pola Sebaran Kekuasaan	Daftar Pertanyaan	Ketua Kelompok Tani
4. Ketercapaian Kelembagaan	Keberhasilan program, keberhasilan Sasaran, kepuasan Terhadap program	<i>in-depth interview</i>	Ketua Kelompok Tani
5. Keanggotaan	Pola perekrutan, Pihak yang Memutuskan, Kesetiaan anggota, Frekuensi pertemuan, Partisipasi anggota	Daftar Pertanyaan	Ketua Kelompok Tani
6. Kepemimpinan	Landasan pemilihan, Kekuasaan pemimpin, Gaya kepemimpinan, Periode pemilihan	Daftar Pertanyaan	Pengurus Kelompok Tani

Tabel 1. Lanjutan

No. Variabel	Data yang diambil	Teknik pengumpulan data	Sumber data
7. Aspek Kultural	Sistem tata nilai, Norma, Kultur	Daftar Pertanyaan	Ketua dan anggota Kelompok Tani
8. Kapasitas Kelembagaan	Manfaat Gapoktan bagi masyarakat, tata kelola dan manajemen organisasi yang baik	<i>in-depth interview</i>	Ketua Kelompok Tani

### 3.4 Analisis Data

Analisis data adalah metode yang dapat menjelaskan dan menerangkan data yang ada ke dalam bentuk kalimat yang mudah dimengerti. Analisis pada penelitian dilakukan secara kualitatif menggunakan metode studi kasus. Konsep utama yang digunakan sebagai alat analisis adalah konsep kelembagaan (Ostrom, 1990). Efektivitas kelembagaan dievaluasi dengan menggunakan prinsip prinsip model Ostrom (1999) yang mencirikan susunan aturan yang dirancang untuk pengelolaan *CPRs lestari*. Penentuan informan dilakukan menggunakan metode *snow-balling*.

## **V. SIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Simpulan**

1. Perbedaan pada kedua gapoktan yakni anggota yang tergabung dalam Gapoktan Mahardika sebagian bukan penduduk asli (pendatang) di Pekon Sidomulyo, sehingga membuat kelembagaan dan lahan yang mereka garap belum mendapatkan hasil yang maksimal, faktor lainnya yakni karena masyarakat yang mempunyai lahan tersebut mayoritas mempunyai pekerjaan lainnya, sedangkan Gapoktan Sinar Harapan anggotanya adalah masyarakat asli Pekon Datar Lebuay sehingga membuat kelembagaan dan lahan yang mereka garap hasilnya lebih banyak dan masyarakat yang mempunyai lahan disana mayoritas bertempat tinggal disana.
2. Proses pengambilan keputusan Gapoktan Sinar Harapan berdasarkan musyawarah yang melibatkan seluruh anggota kelompok tani, anggota kelompok tani tersebut memiliki sistem tata nilai luhur yang dicirikan dengan persepsi sebagian besar anggota terhadap hakekat hidup adalah berorientasi ke masa depan, dan lingkungannya, sehingga tingkat ketercapaian program Gapoktan Sinar Harapan lebih tinggi.

### **5.2 Saran**

Pengelolaan lahan HKm perlu ditingkatkan pada kedua Gapoktan. Pada Gapoktan Mahardika pertemuan harus sering dilakukan karena sebagian besar pemilik lahan bukan masyarakat setempat. Selain itu untuk kedua Gapoktan perlu dilakukan pendekatan pendidikan kepada anggota kelompok tani melalui penyuluhan dan pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan lahan dan tanaman khususnya penanganan hama dan penyakit.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Firdaus,. Dan Abdullah, Wasilah. 2012. *Akutansi Biaya*. Edisi 3 Salemba Empat.
- Ahmad, Rizal. 2015. *Pengaruh profitabilitas dan invesmen opportunity set terhadap kebijakan deviden tunai*. *Jurnal Sylva Lestari* : 2(2) 1979 – 5408.
- Alia Bihrajihant Raya. 2014. *Farmer Group Performance of Collective Chili Marketing on Sandy Land Area of Yogyakarta Province Indonesia*. Canadian Center of Science and Education. Japan.
- Aminah, L. N. (2018). Analisis kelembagaan gapoktan di Kesatuan Pengelolaan Hutan IX Kota Agung Utara Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung. Thesis. Lampung: Universitas Lampung. 86 hlm.
- Azizah L., Ichsan C., A., Webliana K. 2021. Analisis Kapasitas Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Waku Lani Desa Lenek Duren dan Desa Toya Lombok Timur. *Jurnal Sylva Scientae* : 4(2) ISSN 2622-8963
- Emmanuel Tolno, Hajime Kobayashi, Matsumura Ichizen, Mohamed Esham & Boubacar Siddighi Balde. 2014. *Economic Analysis of the Role of Farmer Organizations in Enhancing Smallholder Potato Farmers' Income in Middle Guinea*. Canadian Center of Science and Education. Japan.
- Firdaus, M., Harmini dan Farid, M.A. 2011. *Aplikasi Metode Kuantitatif untuk Manajemen dan Bisnis*. Bogor (ID): IPB Press.
- Hakim. I., Irawanti. S, Murniati, Sumarhani, Widiarti. A, Effendi. R, Muslich. M, Rulliaty. S. 2010. *Sosial Forestry Menuju Restorasi Pembangunan Kehutanan Berkelanjutan*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan Kampus Balitbang Kehutanan, Bogor.
- Kaskoyo, H., Mohammed, A.J., and Inou, M., 2014. *Present State of Community Forestry (Hutan Kemasyarakatan/HKm) Program in a Protection Forest and Its Challenges: Case Study in Lampung Province, Indonesia*. *Journal of Forest Science*. 30(1):15-29.

- Kesatuan Pengelolaan Hutan Batutegi. 2012. *Rencana Pengelolaaan Hutan Jangka Panjang*. Buku.Kesatuan Pengelolaan Hutan Batutegi. Lampung. 254 hlm.
- Laksemi, S., Sulistyawati E., Mulyaningrum. 2019. Perhutanan Sosial Berkelanjutan di Provinsi Bali. *Jurnal Sylva Lestari*, 7 (2)2
- Mukhtar. 2010. *Pengelolaan Program Hutan Kemasyarakatan Berbasis Kearifan Lokal: Studi Kasus Di Kawasan Hutan Lindung Sesaot Lombok Barat*. WACANA 13(1)
- Mutaqin. Z., 2013. *Analisis Kelembagaan Kelompok Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Hulu DAS Sekampung (Studi Kasus pada Gapoktan Hijau Makmur)*. Jurnal Ilmiah, ESAI 7(2).
- Nurdiani, Nina. 2014. *Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan*. Binus University: ComTech 5(2) : 1110 - 1118
- Ofuoku,A.U and Chukwuji,C.O. 2012. *Farmers' Groups Growth Trend in Delta State*. Global Journals, Nigeria.
- Ostrom, E. 1990. *Governing The Commons*. The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge University Press.
- Ostrom E. 2005. *Understanding Institutional Diversity*. Princeton and Oxford: Princenton University Press.
- Qurniati, R., Febryano, I. G. dan Zulfian, D. 2017. *How trust influence social capital to support collective action in agroforestry development?. J. Biodiversitas*. 18(3): 1201-1206.
- Ramli Ramadhan, Deni Firman Syah, Nugroho Tri Waskhito. 2022. *Efektivitas dan kondisi kelembagaan dalam program perhutanan sosial : kasus kajian Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Sumber makmuk, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Malang*. Jurnal Sylva Lestari. 10(2)
- Riniarti, M., Setiawan Agus, 2014. *Status kesuburan tanah pada dua tutupan lahan di KPH Batutegi Lampung*. Jurnal Sylva Lestari. 2(2)
- Ritonga. Wilson Mandela., dan Rochana. Erna. 2013. *Keberhasilan Program Hutan Kemasyarakatan Dalam Melestarikan Hutan*. Jurnal Sociologie. 1( 2).
- Rohana, S., Wulandari C., dan Yuwono B. S. 2016. Peningkatan kualitas dan Kuantitas Sumberdaya manusia pada KPH Batutegi dan Kota Agung Utara di Provinsi Lampung. *Jurnal Sylva Lestari*. 4(1).

- Santana, Septiawan. 2017. *Jurnalisme kontemporer Edisi Kedua*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Setiawan R., Febriyano I. G. , Bintoro, A., 2014. Partisipasi Masyarakat pada Pengembangan Kemitraan di KPH Unit XIV Gedong Wani. *Jurnal Sylva Lestari*, 6(3).
- Safe'i, R., Febryano, I. G. & Aminah, L. (2018). Pengaruh keberadaan gabungan kelompok tani terhadap pendapatan petani dan perubahan tutupan lahan di hutan kemasyarakatan. *Jurnal Sosiohumaniora*. 20(2), 109-114.
- Suprayitno. Riyanto A., 2016. *Pelibatan Masyarakat Lokal: Upaya Memberdayakan Masyarakat Menuju Hutan Lestari*. *Jurnal Sylva lestari*, 4(2).
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 342. 2014. *Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Batutegi Provinsi Lampung Periode 2014 – 2023*.
- Syahyuti, S. 2016. *Kelemahan konsep dan pendekatan dalam pengembangan organisasi petani : Analisis kritis terhadap permentan No. 273 Tahun 2007*. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 10(2), 119 – 142.
- Willyam Buli, Samsul Bakri, dan Indra Gumay Febryano, 2018. *Kelembagaan Pertambangan di Hutan Rakyat*. *Jurnal Sylva Lestari*. 6(3).
- Widyastuti, S., 2013. *Kajian Nilai Hutan Kemasyarakatan di Provinsi Lampung dan Kontribusinya pada Pembangunan Daerah*. WATALA, Bandar Lampung.